



Meski Tuai Sorotan, Pemkab Tuban Tetap Bangun Dua RTH Senilai Hampir Rp50 Miliar

kabartuban.com - Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menggelontorkan anggaran jumbo untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Pada Tahun Anggaran 2026, dua proyek RTH yang berada di Kecamatan Palang dan Kecamatan Bangilan disiapkan dengan total nilai hampir mencapai Rp50 miliar.

Berdasarkan data pada laman LPSE Kabupaten Tuban, kedua proyek tersebut saat ini telah memasuki tahapan tender.

Paket pembangunan RTH 3 di Kecamatan Palang tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp29,3 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp24,9 miliar. Sementara itu, pembangunan RTH 4 di Kecamatan Bangilan juga memiliki pagu

anggaran Rp29,3 miliar dengan HPS sebesar Rp24,99 miliar.

Jika mengacu pada nilai HPS kedua paket pekerjaan tersebut, total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp49,99 miliar atau nyaris menyentuh angka Rp50 miliar.

Kedua proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR PRKP) Kabupaten Tuban dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026. Proyek ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan penyeimbang pembangunan fisik di tengah pesatnya pertumbuhan infrastruktur dan penduduk.

Selain itu, Mega proyek besar itu bertujuan untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan seperti suhu mikro dan polusi udara, serta berfungsi sebagai area resapan air yang efektif untuk mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Lebih dari sekadar fungsi ekologis, RTH ini diproyeksikan menjadi ruang publik yang meningkatkan kesejahteraan warga melalui penyediaan area rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial.

Dalam proses pengadaannya, pemerintah menggunakan metode Tender Pascakualifikasi Satu File dengan sistem harga terendah sistem gugur tanpa mekanisme reverse auction. Berdasarkan data LPSE, saat ini kedua paket pekerjaan masih berada....

[Baca Selengkapnya....](#)



Bulan Suro Jadi Berkah Emak-emak Tuban, Mayoritas Harga Bahan Pokok Stabil dan Cenderung Turun

kabartuban.com - Bulan Suro yang identik dengan sepiya hajatan membawa berkah tersendiri bagi para ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban. Di tengah lesunya aktivitas masyarakat, mayoritas harga bahan pokok di pasar tradisional terpantau stabil, bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan sehingga pengeluaran belanja dapur menjadi lebih hemat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, perbandingan harga bahan pokok pada 6-7 Juli 2026 menunjukkan sebagian besar komoditas tidak mengalami perubahan. Kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya permintaan pasar selama bulan Suro, yang bertepatan dengan minimnya penyelenggaraan hajatan, serta melimpahnya

pasokan dari daerah sentra produksi.

Komoditas beras masih bertahan di harga sebelumnya. Beras premium tetap dijual Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogram. Harga gula kristal putih juga stabil di Rp17.200 per kilogram, begitu pula minyak goreng kemasan sederhana yang bertahan di harga Rp21.200 per liter.

Meski mayoritas komoditas stabil, beberapa di antaranya mengalami penurunan harga. Minyak goreng curah turun dari Rp20.800 menjadi Rp20.700 per liter. Telur ayam ras juga turun dari Rp22.900 menjadi Rp22.700 per kilogram, disusul bawang putih yang....

[Baca Selengkapnya....](#)

DPRD Soroti SILPA Rp485,69 Miliar, Minta Pemkab Tuban Lebih Optimal Kelola Anggaran



kabartuban.com – Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Tuban tak hanya menjadi agenda formal pengesahan laporan keuangan. Di balik persetujuan tersebut, DPRD melontarkan sorotan tajam terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp485,69 miliar.

Persetujuan Raperda itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tuban, Rabu (8/7/2026), yang diwarnai penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapat akhir fraksi-fraksi, hingga penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengatakan besarnya SILPA menjadi pekerjaan rumah yang harus disikapi serius pemerintah daerah. Menurutnya, anggaran yang belum terserap secara optimal perlu dievaluasi agar

dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Fungsi kami adalah memastikan mekanisme check and balance berjalan dengan baik. Karena itu kami memberikan sejumlah catatan, terutama agar anggaran benar-benar terserap secara efektif pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya usai rapat.

Selain meminta optimalisasi pemanfaatan SILPA, DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sugiantoro, berbagai rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan perubahan APBD 2026 maupun perencanaan anggaran tahun 2027.

Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD tetap mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memaparkan realisasi APBD 2025 yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp3,29 triliun dan belanja daerah Rp3,11 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran Rp187,9 miliar. Adapun total SILPA tercatat sebesar Rp485,69 miliar.

Lindra, sapaan akrab bupati, menjelaskan tingginya SILPA bukan semata-mata karena rendahnya penyerapan anggaran, tetapi dipengaruhi sejumlah kebijakan, termasuk pembatalan rencana kenaikan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) serta efisiensi anggaran dari hasil lelang sejumlah proyek.

“Masukan dari DPRD menjadi evaluasi bagi kami agar penyusunan anggaran berikutnya semakin efektif, tepat sasaran, dan....

[Baca Selengkapnya....](#)

Program Ketahanan Pangan BUMDes Diprotes, Warga Geruduk Kandang Ayam Diduga Jadi Sumber Ledakan Lalat



kabartuban.com – Program ketahanan pangan yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa justru memantik penolakan warga. Puluhan warga Dusun Paloan, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, mendatangi kandang ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemah Ripah, Rabu (8/7/2026). Mereka menuntut peternakan tersebut direlokasi karena diduga menjadi penyebab ledakan populasi lalat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Selama sekitar tiga bulan terakhir, warga mengaku harus hidup berdampingan dengan

serbuan lalat yang masuk ke rumah-rumah, warung makan, tempat ibadah, hingga lembaga pendidikan. Kondisi itu dinilai tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Lokasi kandang ayam yang berdiri di atas lahan aset desa, bekas kawasan wisata Jubung Saerah, disebut terlalu dekat dengan permukiman sehingga dampaknya langsung dirasakan warga sekitar.

Salah seorang pemilik warung makan, Rumiati, mengaku omzet usahanya menurun sejak populasi lalat meningkat.

Menurutnya, banyak pelanggan merasa tidak nyaman karena lalat memenuhi area warung.

“Omzet penjualan warung kami turun sejak ada serbuan lalat dari kandang ayam itu. Pembeli sering mengeluh karena merasa tidak nyaman,”ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Siti Masitah, guru di lembaga pendidikan TK/TPQ yang berjarak sekitar 70 meter dari kandang. Ia khawatir keberadaan lalat dapat mengganggu kesehatan anak-anak, terlebih menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami khawatir terhadap

kesehatan anak-anak. Apalagi nanti ada program MBG, sehingga kebersihan lingkungan harus benar-benar terjaga,” katanya.

Kuasa hukum warga, Subakir, mengatakan penolakan terhadap pembangunan kandang sebenarnya telah disampaikan sejak tahap perencanaan. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat kini terbukti setelah populasi lalat semakin tidak terkendali.

Ia menyebut warga telah menempuh berbagai upaya, mulai dari mediasi....

[Baca Selengkapnya....](#)



Dari Penjual Marning Menjadi Pencipta Salawat Badar, Jejak Hidup KH Ali Manshur Sarat Keteladanan

kabartuban.com – Nama KH Ali Manshur begitu lekat dengan Salawat Badar, lantunan doa yang hingga kini menggema di berbagai penjuru Nusantara. Namun, di balik karya yang terus hidup dari generasi ke generasi, tersimpan perjalanan hidup penuh perjuangan yang jauh dari kemewahan.

Kisah tersebut diungkapkan putra beliau, KH Ahmad Syakir Ali, saat ditemui di kediamannya di Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Menurutnya, sang ayah merupakan sosok sederhana yang...

[Baca Selengkapnya...](#)

Harapan perpanjangan Kontrak Pupus, Guru P3K Tuban Akhirnya Legawa Terima SK Pemutusan Kontrak

kabartuban.com – Penantian panjang selama tujuh bulan akhirnya berujung pada sebuah kepastian bagi puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Tuban. Sejumlah tengah pendidik yang kontraknya tidak diperpanjang akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) pemutusan kontrak sekaligus kejelasan mengenai pencairan hak Jaminan Hari Tua (JHT), Senin (7/7/2026).

Namun, di balik penyerahan dokumen tersebut, tersimpan kisah pengabdian panjang dan perjuangan hidup yang harus mereka jalani sejak kehilangan pekerjaan.

Para guru yang berasal dari jenjang TK, SD, hingga SMP itu diketahui telah diberhentikan sekitar tujuh bulan lalu melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban. Saat itu, selain 39 guru, dua tenaga kesehatan juga mengalami pemutusan kontrak yang dinilai dilakukan sepihak.

Selama berbulan-bulan tanpa

kepastian, sebagian dari mereka masih berharap ada kebijakan baru yang memungkinkan kontrak kembali diperpanjang. Harapan itulah yang membuat sejumlah guru baru mengambil SK pemutusan kontraknya sekarang.

Sulindri, Salah seorang guru mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Perempuan yang telah mengabdikan selama 21 tahun sebagai pendidik di wilayah Kecamatan Singgahan itu mengatakan, dirinya sebenarnya masih berharap dapat kembali mengajar.

“Awalnya kami masih berharap kontrak bisa diperpanjang. Karena itu kami belum mengambil SK. Sekarang kami mencoba legawa menerima kenyataan,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku, dana JHT yang akan diterimanya menjadi harapan untuk menopang ekonomi keluarga....

[Baca Selengkapnya....](#)



Audit Ungkap Kerugian Negara Rp1,3 Miliar, Kasus Kades Kepohagung Masuki Babak Krusial

kabartuban.com – Penanganan dugaan penyalahgunaan dana desa yang menyeret Kepala Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Dono Samuri, memasuki babak penting. Setelah menunggu hampir satu tahun, hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban menyatakan adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar. Temuan tersebut kini telah diserahkan kepada Satreskrim Polresta Tuban untuk ditindaklanjuti.

Kasus ini bermula pada Agustus 2025 ketika warga Desa Kepohagung menyegel kantor kepala desa sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan dana Pendapatan Asli Desa (PAD), kas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), serta dana milik para investor HIPPA.

Berdasarkan data yang dihimpun, total dana yang dipersiapkan

mencapai Rp1.135.729.000. Rinciannya, sekitar Rp.845.729.000 berasal dari PAD dan kas HIPPA desa, sedangkan Rp.290.000.000 merupakan dana investor HIPPA.

Aksi protes warga tidak berhenti di penyegelan kantor desa. Sejumlah warga juga mendatangi Kantor Kecamatan Plumpang untuk mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap status Dono Samuri yang saat itu telah tiga kali menerima Surat Peringatan (SP) karena tidak menjalankan tugas selama lebih dari tiga bulan. Mereka menilai proses penanganan administrasi berjalan terlalu lambat.

Inspektur Pembantu (Irban) V Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, Bambang Suhaji, mengatakan hasil pemeriksaan telah....

[Baca Selengkapnya....](#)